

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomor satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

Tabel. 1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2009 – 2010

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2009 ⁽¹⁾		TAHUN 2010 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	52.769.280		53.828.569		1.059.289	2,01
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	52.764.603	99,99	53.823.732	99,99	1.059.129	2,01
	- Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	52.176.795	98,88	53.207.500	98,85	1.030.705	1,98
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	546.675	1,04	573.601	1,07	26.926	4,93
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	41.133	0,08	42.631	0,08	1.498	3,64
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	4.677	0,01	4.838	0,01	161	3,43
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	98.886.003		102.241.486		3.355.483	3,39
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	96.211.332	97,30	99.401.775	97,22	3.190.443	3,32
	- Usaha Mikro (UMi)	(Orang)	90.012.694	91,03	93.014.759	90,98	3.002.065	3,34
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	3.521.073	3,56	3.627.164	3,55	106.091	3,01
	- Usaha Menengah(UM)	(Orang)	2.677.565	2,71	2.759.852	2,70	82.287	3,07
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	2.674.671	2,70	2.839.711	2,78	165.040	6,17
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	5.294.860,9		6.068.762,8		773.901,9	14,62
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	2.993.151,7	56,53	3.466.393,3	57,12	473.241,5	15,81
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	1.751.644,6	33,08	2.051.878,0	33,81	300.233,3	17,14
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	528.244,2	9,98	597.770,2	9,85	69.526,0	13,16
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	713.262,9	13,47	816.745,1	13,46	103.482,2	14,51
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	2.301.709,2	43,47	2.602.369,5	42,88	300.660,4	13,06
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	2.089.058,5		2.217.947,0		128.888,5	6,17
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	1.212.599,3	58,05	1.282.571,8	57,83	69.972,5	5,77
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	682.259,8	32,66	719.070,2	32,42	36.810,4	5,40
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	224.311,0	10,74	239.111,4	10,78	14.800,4	6,60
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	306.028,5	14,65	324.390,2	14,63	18.361,7	6,00
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	876.459,2	41,95	935.375,2	42,17	58.916,0	6,72

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM RI (www.depkop.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perkembangan UMKM dan Usaha besar dari tahun 2009 sampai tahun 2010. Pada tahun akhir tahun 2010 diperkirakan ada sekitar 53.823.732 UMKM (98,85 %) dari seluruh usaha di

Indonesia. Kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja sekitar 97,22% dan sumbangan UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 57,83%. Mengingat keberadaan UMKM dan perannya sangat besar dalam perekonomian Indonesia, maka diperlukan pemerdayaan UMKM.

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga – lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan – kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemerdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Menurut Tulus T. H. Tambunan (2009: 75), ada beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM yaitu: “Keterbatasan modal usaha, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku dan kesulitan pemasaran”. Untuk mengatasi keterbatasan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi. Menurut Suharni (2003:51) dalam penelitiannya mengatakan bahwa:

Dalam praktek pengusaha mikro biasanya membutuhkan kredit dalam jumlah kecil, dengan jangka waktu pendek dengan angsuran yang sering. Oleh karena itu, apabila tersedia pengikat agunan fisik secara notariil atau harga tetap, namun sangat tidak ekonomis. Oleh karena itu alternatif yang cocok kredit bagi pengusaha mikro menerapkan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama. Jadi sistem tanggung renteng dapat terjadi dalam satu kelompok nasabah.

Proses pembiayaan menggunakan sistem tanggung renteng melalui musyawarah dalam kelompok. Menurut Syaiful (2008:518) mengatakan tentang tanggung renteng bahwa :

Sistem tanggung renteng juga diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam menentukan boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut plafon yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota, minimal yang menjadi anggota kelompoknya.

Selain menerapkan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng, perlunya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat tentang membuka suatu usaha. Pembinaan dan pendampingan masyarakat ini terkait dengan cara menemukan peluang yang baik, manajemen, keterampilan dalam mengelola usaha dan sebagainya agar permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM dapat berkurang ataupun teratasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan UMKM lebih utama karena masyarakatlah sebagai pelaku usaha tersebut sehingga keberhasilan pengembangan UMKM berawal dari sini. Menurut Ravik (2007:139) menyatakan bahwa “ Dalam pemerdayaan UKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang-peluang dan fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemerdayaan yang dilakukan”. Menciptakan suatu UMKM memang tidak mudah diperlukan modal yang cukup dan keterampilan dalam mengelola usaha. Dengan adanya otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah mengatur secara langsung kegiatan ekonomi di

daerahnya sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.

Untuk menjawab permasalahan diatas Dinas Sosial membuat suatu program yang di mana berguna untuk pemerdayaan masyarakat dan membentuk masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan diadakannya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membentuk suatu usaha dan tanpa mempermasalahkan modalnya yang dimana KUBE ini bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk mendukung finansialnya. Penelitian yang dilakukan oleh Joyakin Tampubolon dkk. dalam jurnal yang berjudul “ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE))” dengan responden yang dijadikan sampel sebanyak 224 orang diambil dari dua pengurus dan dua anggota KUBE untuk wilayah Sumatra Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Penelitian ini diketahui bahwa:

Tidak ada keberhasilan aspek social KUBE yang berada dalam kategori sangat rendah, ada 4% KUBE yang berada dalam kategori rendah keberhasilannya. 93,8% KUBE berada dalam kategori cukup berhasil dan hanya 2,2% KUBE yang berada dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan keberhasilan aspek ekonomi 95,5% KUBE berada pada kategori sangat rendah, 4,5% berada dalam ketegori rendah, tidak ada KUBE yang berada dalam ketegori cukup dan sangat tinggi. Tetapi terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata modal awal yang dimiliki KUBE hanya Rp 6.170.000,00 (termasuk bantuan). Setelah pemerdayaan, rata-rata modal akhir Rp 18.138.360,00 atau naik sekitar 1,5 kali lipat. Rata-rata pendapatan responden yaitu Rp 747.522 ,00 dengan jumlah tanggungan rata-rata 3-4 orang. Sedangkan rata-rata pendapatan yang diperoleh anggota dari KUBE adalah Rp 345.000,00. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa pendapatan anggota KUBE sudah berada diatas garis fakir miskin wilayah masing-masing. KUBE merupakan sumber mata pencaharian utama sebagian besar anggota KUBE (59,8%), sedangkan

yang lain menjadikan KUBE sebagai sumber pendapatan sambilan, namun mereka tetap sebagai anggota KUBE mengikuti semua aktifitas yang ada pada KUBE.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman merupakan salah satu program Dinas Sosial Provinsi DIY yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Seperti halnya masyarakat Bimomartani, Ngemplak, Sleman yang merupakan masyarakat pedesaan yang dimana usaha yang mereka jalankan hanya sebatas dibidang perdagangan, pertanian, perikanan, dan peternakan. LKM KUBE Sejahtera 10 bukan sekedar lembaga simpan pinjam akan tetapi didalamnya terintegrasi sebagai lembaga social dan lembaga ekonomi dengan memakai pola syari'ah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini juga memberikan pendampingan dalam pengembangan usaha anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelum penelitian pada beberapa anggota KUBE Ngemplak, Sleman, anggota tersebut mengatakan bahwa yang menjadi penghambat sulitnya mengembangkan usaha adalah kesalahan perencanaan dalam mengelola modal guna memenuhi kebutuhan usaha sehingga sering terjadi kekurangan modal usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola (manajemen) untuk menjalankan usaha sangat kurang sehingga tidak banyak usaha yang tahan lama berdirinya. Anggota juga menyebutkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh KUBE adalah pada aspek social yang meliputi kurangnya kerjasama antar anggota kelompok, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok, dan tingkat partisipasi anggota yang masih rendah.

Untuk mengetahui bagaimana peranan LKM KUBE Sejahtera 10 dalam memberikan pembiayaan dan pendampingan dalam pengembangan usaha anggota maka penulis mencoba untuk meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Keterbatasan permodalan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha.
2. Keterbatasan SDM, Teknologi, informasi, kesulitan pemasaran dan bahan baku menjadi penghambat jalannya suatu usaha.
3. Kesalahan perencanaan dalam mengelola modal usaha anggota KUBE.
4. Ketidakmampuan anggota KUBE dalam mengelola manajemen usaha.
5. Kurangnya kerjasama antara anggota KUBE.
6. Tingkat partisipasi anggota KUBE yang masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua permasalahan yang ada akan diteliti. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian dapat fokus dan mendalam. Penelitian ini akan dibatasi pada

permasalahan mengenai pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota KUBE.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman?
2. Bagaimanakah pengaruh pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman?
3. Bagaimanakah pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.

2. Pengaruh pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.
3. Pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Ngemplak, Sleman.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dicapai melalui kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis menambah pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya tentang pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.

- b. Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman.

Sebagai bahan pertimbangan dan sumber data bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) KUBE Sejahtera 10 guna perbaikan dan peningkatan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat khususnya pada anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).